PENGARUH PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERTUMBUHAN DANA PERIMBANGAN DAN PERTUMBUHAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (2011-2016)

Faisal Kus Tri Maryanto

143140025

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011-2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan model terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan untuk Pertumbuhan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara simultan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2016.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belana Modal, Pertumbuhan Ekonomi

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip ini memperlihatkan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah.

Kesejahteraan masyarakat memang menjadi tujuan utama dari kebijakan otonomi sebagai mana tuntutan pada saat reformasi digulirkan. Tujuan tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Otonomi daerah yang sudah berjalan sejak tahun 2001 telah mengalami berbagai upaya perbaikan yang ditunjukan dengan berbagai perubahan dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan kemudian diperbarui lagi melalui ditetapkanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan perubahan tersebut telah membuktikan bahwa pembenahan sistem pemerintahan daerah terus berjalan dinamis seiring dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Dengan adanya Kebijakan otonomi daerah tersebut, daerah diberikan tanggung jawab dan wewenang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta kewenangan untuk menggunakan kesempatan untuk menggali segala potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah agar berdampak baik bagi keberlangsungan pembangunan daerah-daerah di Indonesia yang berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan, dan jaminan hidup masyarakat yang lebih baik.

Tabel 1.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2016 Dalam Satuan Persen

Kabupaten dan Kota	Tahun						Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Kab. Bantul	5,07	5,33	5,46	5,04	4,97	5,06	5,15
Kab. Kulon Progo	4,23	4,37	4,87	4,57	4,62	4,76	4,57
Kab. Gunung kidul	4,52	4,84	4,97	4,54	4,82	4,89	4,76
Kab. Sleman	5,42	5,79	5,89	5,30	5,18	5,25	5,47
Kota Yogyakarta	5,84	5,40	5,47	5,28	5,09	5,11	5,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab/Kota Prov.DIY (data diolah)

Tabel 1.1 Menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengalami fluktuasi atau naik turunnya pertumbuhan

ekonomi pada setiap tahunya. Hal ini juga dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi, pada Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman masih terjadi kesenjangan yang cukup signifikan di mana kabupaten Kulon Progo memiliki rata-rata terendah yaitu 4,57 persen sedangkan Kabupaten Sleman memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 5,47 persen.

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal yang dialokasikan dari APBD seharusnya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi secara lebih merata. Maka dari itu dari uraian latar belakang masalah di atas maka penelitian ini diberi judul **" Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"**

B. LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang bertujuan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004). Pada intinya Dana Perimbangan merupakan dana alokasi dari pemerintah pusat yang berfungsi untuk mendorong otonomi daerah.

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan himpunan atas hasil setoran pendapatan pajak dan nonpajak dari daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi hasil bersifat proposional untuk setiap daerah, dalam arti penerimaan DBH setiap daerah tidak sama, tergantung pada kontribusi setiap daerah dalam meningkatkan pendapatan Negara.

DBH Merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan DBH pajak bersumber dari: Bea Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, PPh Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21. Disisi lain Penerimaan DBH nonpajak berasal dari sumber daya alam yang bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan

Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal dengan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang ada.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan saran dan prasaran pelayanan dasar msayrakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pelayanan dasar bagi masyrakat meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan prasarana pemerintahan daerah. Sementara itu, untuk bidang teknis tertentu, seperti bidang lingkungan hidup, dan lain-lain. Sesuai Pasal 41 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, pemerintah daerah penerima DAK wajib menganggarkan dan menyediakan dana sekurang-kurangnya 10% dari DAK dalam APBD.

Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang Sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi dimana terjadi peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam landasaan teori maka dalam penelitian yang mengambil kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan variabel-variabelnya Pertumbuhan Ekonomi (Y) yang di

pengaruhi oleh Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (X1), Pertumbuhan Dana Perimbangan (X2), Pertumbuhan Belanja Modal (X3)

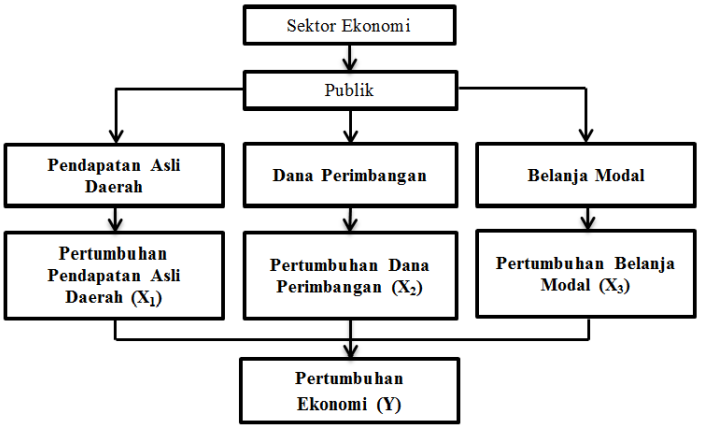

Keterangan : Pengaruh variabel independen (Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah X_1, Pertumbuhan Dana Perimbangan X_2, dan Pertumbuhan Belanja Modal X_3) berpengaruh terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi Y).

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011-2016.
2. Diduga Pertumbuhan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011-2016.
3. Diduga Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011-2016.

C.METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Keseluruhan penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan merupakan data panel (gabungan antara data *time series* dan *cross section*) dalam bentuk tahunan. Data *time series* yang digunakan mulai dari periode 2011-2016. Sedangkan data *cross section* meliputi 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2016.

Alat Analisis

Pada penelitian ini alat analisis menggunakan regresi data panel (*Panel Pooled Data*). Menurut Kuncoro, (2007) data panel adalah penggabungan antara data runtut waktu (*time series*) dengan data silang *(cross section).* Kemudian Agus Widarjono, (2007) menyatakan terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu *Pooling Least Square (Common Effect)*, pendekataan efek tetap *(Fixed Effect)*, pendekatan efek random *(Random Effect)*.

Persamaan model menggunakan data cross sectiondapat ditulis sebagai berikut:

$Yit = \beta 0 + \beta 1\ X1_{it} + \beta 2\ X2_{it} + \beta 3\ X3_{it} + U_{it}$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Ekonomi
X1 = Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
X2 = Pertumbuhan Dana Perimbangan
X3 = Pertumbuhan Belanja Modal
i = cross section
t = time series
B_0 = konstanta
B_1, B_2 = koefisien
U = error

Dalam analisis model data panel, Agus Widarjono, (2007) menggunakan tiga macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan koefisien tetap antar waktu dan individu (*common effect*), efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Ketiga pendekatan yang digunakan dalam analisis data panel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Commond Effect*

   Merupakan suatu estimasi data panel yang hanya mengombinasikan data *time series* dan *cross-section* dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu atau waktu. Dalam model ini terdapat asumsi bahwa intersep dan koefisien regresi nilainya tetap untuk setiap objek penelitian dan waktu.
2. Pendekatan efek tetap (*Fixed effect*)

   Salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit (*cross-section*) maupun antar waktu (*time-series*). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV).
3. Pendekatan efek acak (*Random effect*)

   Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*).

Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model panel data yang di dalamnya melibatkan korelasi antar *error term* karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen eror (*error component model*) atau disebut juga model efek acak (*random effect*). Menurut Judge ada empat pertimbangan pokok untuk memilih antara menggunakan pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*) dalam data panel :

D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dari hasil olah data yang diperoleh adalah estimasi data panel yang dipilih adalah Fixed Effect Model yang dapat dilihat sebagai berikut :

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 09/27/18 Time: 23:41
Sample: 2011 2016
Included observations: 6
Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 30

Variable	*Coefficient*	*Std. Error*	*t-Statistic*	*Prob.*
C	2.640082	3.342955	0.789745	0.4381
X1?	0.006297	0.002166	2.907612	0.0082
X2?	-0.280818	0.165770	-1.694026	0.1044
X3?	0.003934	0.001239	3.175263	0.0044
Fixed Effects (Cross)				
_BANTUL--C	5.626860			
_KULONPROGO--C	-20.57968			
_GUNUNGKIDUL--C	8.939235			
_SLEMAN--C	16.96715			
_JOGJA--C	-10.95356			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.521181	*Mean dependent var*	4.599667
Adjusted R-squared	0.368830	*S.D. dependent var*	22.56080
S.E. of regression	17.92371	*Akaike info criterion*	8.833304
Sum squared resid	7067.705	*Schwarz criterion*	9.206957
Log likelihood	-124.4996	*Hannan-Quinn criter.*	8.952839
F-statistic	3.420913	*Durbin-Watson stat*	1.679671
Prob(F-statistic)	0.012552		

Berdasarkan hasil estim asi regresi data panel pada tabel 4.4 maka persamaan regresi data panel yang diperoleh ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut:

Yit = 2.640082 + 0.006297 X1 it -0.280818 X2 it + 0.003934 X3 it + eit

Berdasarkan hasil persamaan diatas dapat dianalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:

1. Konstanta (α) sebesar 2.640082 artinya bahwa jika pertumbuhan pendapatan assli daerah, pertumbuhan dana perimbangan dan pertumbuhan belanja modal adalah nol (0) maka nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2.640082 persen .
2. Nilai koefisien regresi pertumbuhan pendapatan asli daerah 0.006297 memiliki tanda positif yang artinya setiap pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 0.006297 persen (*cateris paribus*).
3. Pertumbuhan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
4. Nilai koefisien regresi pertumbuhan belanja modal 0.003934 memiliki tanda positif yang artinya setiap pertumbuhan belanja modal Provinsi sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 0.003934 persen (*cateris paribus*).

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

F-tabel = (α=0.05 : k-1;n-k)
= (α=0.05 : 3-1;30-3)
= (α=0.05 : 2;27) = 3.35

F hitung = 3.420913 dengan nilai signifikan 0.012552

Karena f hitung (3.420913) > f tabel (3.35), maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti secara simultan variabel Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah, Pertumbuhan Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependennya dapat dijelaskan oleh variasi nilai dari variabel-variabel independennya. Dalam penelitian ini analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase dari Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah, Pertumbuhan Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Belanja Modal mampu menjelaskan seberapa besar pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil dari regresi data panel yang telah dilakukan menggunakan *Fixed Effect Model* nilai dari R-square adalah 0.521181, hal ini menunjukkan bahwa variasi dari variabel-variabel independen (Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah, Pertumbuhan Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Belanja Modal) secara bersama-sama mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variasi Pertumbuhan Ekonomi sebesar 52,11 persen, sedangkan sisanya sebesar 47,89 persen (100% - 52,11%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti atau tidak dimasukkan dalam model pada penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan serta pengujian hipotesis, maka tujuan dalam penelitian ini telah tercapai dan dapat diambil kesimpulansebagai berikut:

a. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2016, sehingga sesuai dengan hipotesis peneliti.
b. Pertumbuhan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2016, sehingga tidak sesuai dengan hipotesis peneliti.
c. Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2016, sehingga sesuai dengan hipotesis peneliti.

Saran

Merujuk pada temuan-temuan penelitian ini dan atas kesimpulan di atas serta keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka disusun saran-saran sebagai berikut :

a. Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik dengan penelitian serupa, disarankan agar penelitian yang dilakukan dalam ruang lingkup yang lebih luas dan dengan penggunaan data yang lebih lengkap serta dengan rentang waktu periode penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian.
b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan untuk mengoptimalkan lagi alokasi dari dana perimbangan, untuk meningkatkan fasilitas publik dan fasilitas modal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur akan berdampak pada peningkatan investasi sehingga pendapatan masing-masing daerah dapat meningkat dan dengan begitu pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan masing-masing daerah akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo (2011). "*Pembiayaan Pembangunan Daerah".* Graha Ilmu, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik "Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan" Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016

Bawono, Icuk Rangga dan Novelsyah, Mochammad (2012), "*Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara" Pada SKPD Dan SKPKD,* Edisi 1. Selemba Empat, Jakarta

Darise, Nurlan (2008), "*Akuntansi Keuangan Daerah" (Akuntansi Sektor Publik),* Cetakan 1. Indeks. Jakarta

Deddi Nordiawan (2006), "*Akuntansi Sektor Publik"* . Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Direktorat Jenderal Keuangan Republik Indonesia**.** Data Realisasi APBD Pemerintah Daerah Tahun 2011-2016.

Fadilah,(2017) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010-2015" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Ghozali, Imam (2013)."Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Dengan Program Eviews 8, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Gujarati. N. Damordar (2003)**,** *Basic Econometrics***,** 4Th Edition, Mc. Graw Hill Macmillan Publisher, USA.

Halim, Abdul (2007), "*Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah",* Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

Kuncoro. Mudrajad (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, dtrategi, dan Peluang*, Erlangga, Jakarta.

Kusumastuti, Anes Lailia (2012) "Pengaruh Pendapatan Asli, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Pada Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur" IAIN Srakarta

Mamesah. D,J (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah,* Pustaka Utama, Jakarta.

Mardiasmo (2002). "Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Nordiawan. Dedi (2006), *Akuntansi Sektor Publik,* Salemba Empat, Jakarta.

Novianto Riko, Hanafiah Rafiudin (2015). "Pengaruh Pendapatan Asli Darerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal." Jurnal Ekonomi vol. 4 No. 1 Januari-Juni 20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Peraturan Pemeritah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keungan Daerah.

Permanasari, W. Amiga (2013) "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Eonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (2009-2011)" Universitas Muhamamdiyah Surakarta

Siahaan. P. Marihot (2005), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sihite, Friska (2010) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara 2004-2007". Universitas Dharma Persada

Standar Akutansi Pemerintah (SAP). *Pengertian Belanja Modal*.

Sugiyono (2012), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D***,** Alfabeta,. Bandung.

Syaiful (2008). *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Hak,Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Widarjono. Agus (2007), *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*,Edisi Kedua, EKONISIA, Yogyakarta.

Widarjono. Agus (2018), *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*,Edisi Kelima, EKONISIA, Yogyakarta.